

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pada satuan kerja pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan serta pedoman untuk pelaksanaan anggaran negara dan juga mengatur sistem penerimaan serta pengeluaran kas negara. Untuk menciptakan *egovernment*, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, Kementerian Keuangan kemudian mengembangkan proyek perbaikan dalam manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah melalui penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN yang resmi diluncurkan secara resmi pada tahun 2015 merupakan bagian dari *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dari manajemen keuangan pemerintah. IFMIS di Indonesia (SPAN) telah berfungsi secara efektif dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah (Hakim & Maulana, 2019).

Setelah berhasil menerapkan SPAN, IFMIS pada posisi Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan melanjutkan dengan penerapan IFMIS

pada level satuan kerja (satker) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI berfungsi sebagai *platform* digital yang mempermudah pencatatan serta pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan bagi satuan kerja. Tujuan aplikasi ini adalah menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Aplikasi SAKTI dirancang untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan di tingkat instansi mencakup modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, serta modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya serta teknologi informasi. Sebelumnya, satuan kerja mengandalkan aplikasi yang ada seperti SAS (Pembayaran dan Komitmen), SIMAK BMN (Penatausahaan Aset), SAIBA (Pelaporan), Silabi (Bendahara), RKAKL DIPA (Penganggaran), dan Persediaan (Penatausahaan Persediaan) yang masih beroperasi secara *offline* dan bersifat independen.

Kementerian Keuangan melakukan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu melibatkan serangkaian kegiatan untuk menerapkan dan mengoperasikan SAKTI dengan memanfaatkan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur, serta teknologi SAKTI di unit-unit terpilih. Tujuannya adalah memastikan SAKTI dapat beroperasi secara menyeluruh, mengurangi risiko kegagalan dan memberikan waktu untuk perbaikan pada sistem. *Piloting* SAKTI dilakukan dalam empat tahap, Tahap I dimulai pada tahun 2015 di lima satker yang berada dalam lingkup Kantor Wilayah DJPB

Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu, Tahap II berlangsung di seluruh satker DJPB di seluruh Indonesia, Tahap III mencakup semua satker di Kementerian Keuangan dan juga beberapa satker di Kementerian Negara/Lembaga, dan Tahap IV diterapkan di seluruh Kementerian Negara/Lembaga tetapi hanya untuk modul penganggaran atau perencanaan. Sejak tahun anggaran 2022, Kementerian Keuangan mengimplementasikan SAKTI dengan Modul penuh berbasis *web* di semua Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan implementasi SAKTI ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari penggunaan sistem manual atau sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansi.(Amriani & Iskandar, 2019)

Penerapan SAKTI di semua kementerian dan lembaga dimulai pada tahun 2022. Sebelum adanya aplikasi SAKTI, setiap satuan kerja menggunakan aplikasi terpisah untuk menyampaikan laporan keuangan. Aplikasi SAKTI diwajibkan untuk semua satuan kerja Kementerian Lembaga di seluruh Indonesia mulai tahun 2022. Namun, hasil dari beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SAKTI belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami masalah dan tantangan yang dihadapi satuan kerja saat menerapkan aplikasi SAKTI pelaporan keuangan yang mengakibatkan implementasi belum sepenuhnya berhasil.

Salah satu satuan kerja yang menerapkan aplikasi SAKTI adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta (Poltekkes Yogyakarta). Dengan peran sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara, diharapkan Poltekkes Yogyakarta dapat menerapkan sistem keuangan yang

disiplin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun, ada berbagai kendala yang ditemukan dalam penerapan aplikasi SAKTI di satuan kerja ini, terutama dalam pengelolaan anggaran, khususnya saat melakukan revisi DIPA yang sering kali dilakukan tidak mengikuti tahapan yang tepat.

Prosedur yang jelas dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan di instansi pemerintah adalah pengajuan perubahan atau revisi DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran). Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan SOP yang ada. Hal ini dapat menimbulkan ketidakberaturan dan keterlambatan proses dalam pencatatan anggaran.

Penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam suatu instansi sangat krusial untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana negara. Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi (SAKTI) diperkenalkan untuk mempermudah proses pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, implementasi sistem ini menghadapi tantangan signifikan dalam hal fleksibilitas pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan proses perencanaan dan revisi anggaran (DIPA).

Menurut Gultom & Khudri (2024), sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi seperti SAKTI bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, di lapangan, banyak instansi

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang berubah selama tahun anggaran. Hal ini terjadi karena sistem ini cenderung rigid dalam proses revisi anggaran, sehingga perubahan yang diperlukan seringkali tidak dapat diproses dengan cepat.

Setiap Pengguna Anggaran (PA) dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab atas anggaran yang diberikan sesuai dengan rincian kegiatan yang telah disusun dalam DIPA. Pada awal tahun anggaran, DIPA yang telah disusun dibagikan kepada masing-masing PA, yang terdiri dari berbagai jajaran direktur dan jurusan, seperti Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3, serta jurusan-jurusan yang ada di instansi tersebut. Setiap PA memiliki pagu anggaran yang telah ditetapkan, yang berfungsi untuk mendukung berbagai kegiatan operasional di setiap unit. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan revisi anggaran, peran teknis pengajuan revisi anggaran diajukan oleh operator keuangan yang ada di masing-masing jurusan. PA mencakup jajaran Wakil Direktur 1, 2, dan 3 serta 6 jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Kesehatan Gigi, Kebidanan, dan Teknologi Laboratorium Medis. Khususnya, Wakil Direktur 2 disini merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengkoordinasikan proses anggaran, termasuk bendahara pengeluaran dan pejabat perencanaan anggaran.

Sering kali terjadi situasi ketika kegiatan yang telah direncanakan perlu disesuaikan dengan kondisi mendesak yang muncul di tengah tahun anggaran. Revisi anggaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat tersebut sering kali tidak dapat segera diakomodasi karena proses pengajuan

revisi memerlukan waktu persetujuan yang cukup panjang, serta tidak memungkinkan adanya perubahan pagu anggaran. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan antara kegiatan yang telah berjalan dengan dokumen anggaran yang belum mengalami revisi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengajuan revisi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses validasi bukti pengeluaran.

Menurut Kamala *et al.* (2025), masalah utama dalam implementasi revisi anggaran adalah ketidakfleksibelan dalam sistem yang ada, yang menyebabkan pengelolaan anggaran menjadi kurang efisien dan tidak responsif terhadap perubahan yang mendesak. Pengajuan revisi anggaran yang tidak diselesaikan tepat waktu berdampak negatif terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

Proses validasi oleh bendahara pengeluaran juga menghadapi sejumlah hambatan. Walaupun aplikasi SAKTI memungkinkan input data secara *online* yang mempercepat proses, kendala tetap muncul saat revisi anggaran diajukan secara massal dan bersamaan oleh banyak PA. Situasi ini mengganggu proses validasi dan menghambat kelancaran pengelolaan anggaran, karena bukti pembayaran yang telah diajukan belum dapat diverifikasi sebelum revisi disetujui. Keterlambatan dalam penyelesaian revisi anggaran ini berdampak pada penurunan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Poltekkes Yogyakarta, sehingga menurunkan efektivitas pengelolaan anggaran (Jayusman, 2021).

Sebagai hasilnya, sistem SAKTI yang seharusnya mendukung pengelolaan anggaran secara efisien dan transparan, malah terkendala oleh ketidakfleksibelan dalam pengelolaan revisi anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses revisi yang tidak tepat waktu ini berpotensi mengganggu kelancaran operasional dan memperburuk kinerja pengelolaan anggaran di instansi terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai tantangan terkait ketidaksesuaian prosedur revisi DIPA dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaporan keuangan di tingkat satuan kerja. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi SAKTI dan SPAN dalam pengelolaan keuangan pemerintah, namun belum banyak yang secara spesifik menyoroti tantangan dalam prosedur revisi DIPA yang tidak sesuai dengan SOP Perencanaan DIPA di awal tahun. Kondisi ini berdampak pada efisiensi dan akurasi laporan pertanggungjawaban keuangan di tingkat satuan kerja, terutama ketika revisi dilakukan di tengah tahun anggaran, yang sering kali terjadi setelah kegiatan dimulai.

Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sistem pengajuan revisi DIPA yang tidak sesuai dengan SOP perencanaan yang telah ditetapkan menjadi masalah utama yang mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan. Revisi DIPA yang dilakukan di tengah tahun anggaran ketika kegiatan sudah berlangsung memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk proses penginputan dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Hal ini mengakibatkan Bendahara Pengeluaran kesulitan dalam memvalidasi

pengeluaran karena uang telah dikeluarkan tanpa pengadministrasian yang jelas. Akibatnya, proses pertanggungjawaban keuangan, terutama pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), mengalami keterlambatan dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Dampak dari ketidaksesuaian prosedur ini sangat besar, tidak hanya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan, tetapi juga terhadap kelancaran aliran dana yang berpotensi memperlambat pencapaian target anggaran dan menunda proses laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan revisi anggaran yang tidak sesuai SOP ini menjadi permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan agar tidak berdampak lebih jauh terhadap kinerja keuangan di tingkat instansi.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah diterapkan di Politeknik Kesehatan Yogyakarta seharusnya dapat mempercepat proses pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal pengajuan revisi DIPA dan pertanggungjawaban SPJ. Meskipun SAKTI bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses ini, praktiknya masih terdapat hambatan yang menghambat efektivitasnya, terutama dalam mengatasi masalah ketidaksesuaian prosedur revisi anggaran dan keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban.

Melalui analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta dalam menerapkan prosedur revisi DIPA, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi

praktis dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran, serta memitigasi masalah administrasi dan pertanggungjawaban yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan terkait revisi anggaran dapat disesuaikan untuk meningkatkan kelancaran dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat instansi pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang lebih fokus pada perbaikan prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI, terutama dalam proses pengajuan revisi DIPA yang dilakukan terlalu dekat atau setelah kegiatan dilaksanakan.
3. Dampak dari proses revisi DIPA yang tidak sesuai dengan SOP terhadap peran Bendahara Pengeluaran dan proses pertanggungjawaban keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

4. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan aplikasi SAKTI dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI, terutama yang terkait dengan proses revisi DIPA yang dilakukan terlalu berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan?
3. Bagaimana dampak dari proses revisi DIPA yang tidak sesuai SOP terhadap peran Bendahara Pengeluaran dan proses pertanggungjawaban keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta?
4. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi masalah yang timbul akibat ketidaksesuaian sistem dalam proses pengajuan revisi DIPA dengan SOP yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta

dampaknya terhadap proses pertanggungjawaban pelaporan anggaran yang terhambat di Bendahara Pengeluaran. Adapun tujuan utama dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis penerapan penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aplikasi SAKTI mendukung pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI, terutama yang berkaitan dengan proses pengajuan revisi DIPA yang dilakukan terlalu berdekatan atau setelah pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul ketika pengajuan revisi DIPA dilakukan terlambat, sehingga berdampak pada terhambatnya validasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

3. Mengevaluasi dampak dari proses pengajuan revisi DIPA yang tidak sesuai SOP terhadap tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesulitan yang dialami oleh Bendahara Pengeluaran dalam memvalidasi penggunaan anggaran, yang menghambat proses validasi pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga mengakibatkan SPJ menggantung.

4. Memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Saran ini bertujuan untuk membantu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta agar proses pengajuan revisi DIPA dapat dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, serta memperbaiki proses validasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman tentang penerapan sistem keuangan digital dalam pengelolaan keuangan negara.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait penerapan aplikasi SAKTI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan satuan kerja pemerintah.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran agar sesuai dengan SOP perencanaan dan SOP revisi DIPA.

- b. Bagi Bendahara Pengeluaran, penelitian ini dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencatatan dan validasi pelaporan penggunaan anggaran.

1.6 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, batasan yang akan ditetapkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Fokus lokasi penelitian :

Penelitian ini hanya dilaksanakan di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang telah menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan.

2. Subjek penelitian :

Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan anggaran, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, serta tim Keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

3. Aspek yang dikaji :

- a. Proses pengelolaan anggaran menggunakan aplikasi SAKTI
- b. Permasalahan revisi DIPA yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP.
- c. Dampak dari proses pengajuan revisi DIPA terhadap posisi Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan satuan kerja.

4. Sistem yang digunakan :

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis terkait pengembangan atau pemrograman aplikasi SAKTI, tetapi lebih pada penerapan dan penggunaan aplikasi tersebut dalam pengelolaan anggaran di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

5. Proses yang diperhatikan :

Penelitian ini akan meneliti proses pengelolaan anggaran melalui aplikasi SAKTI dengan fokus pada masalah yang timbul akibat dari ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dan prosedur SOP Perencanaan DIPA. Hal ini termasuk pengajuan revisi DIPA yang tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, serta dampaknya terhadap validasi pertanggung jawaban anggaran oleh Bendahara Pengeluaran.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan terhadap SOP revisi anggaran, mengurangi permasalahan dalam proses revisi DIPA, serta memastikan keuangan negara dikelola dengan lebih tertib dan akuntabel terkait dengan penggunaan aplikasi SAKTI.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori yang mendasari penelitian, seperti pengelolaan keuangan negara, revisi DIPA, serta implementasi aplikasi SAKTI.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dari penelitian mengenai penerapan aplikasi SAKTI di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.